

# Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Kebakaran Di Kabupaten Sidoarjo

Oleh:  
**GUNAWAN**  
232020100230

Dosen Pembimbing: Hendra Sukmana, M.AP

**PRODI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS BISNIS, HUKUM, DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO**



# PENDAHULUAN



Pemerintah Indonesia telah membangun sistem nasional penanggulangan bencana yang mencakup 3 aspek, yakni legislasi, kelembagaan, serta pendanaan. Pengaturan mengenai kebencanaan telah diatur oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta, benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

Mengingat tingginya risiko bencana yang terjadi, untuk itu mitigasi bencana menjadi aspek penting dalam upaya mengurangi dampak negatif dari kejadian bencana. Komitmen penanggulangan bencana merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan sebelum bencana terjadi dengan tujuan mengurangi atau menghilangkan dampak dari bencana tersebut terhadap manusia dan lingkungan.

# PENDAHULUAN

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran serta Tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.



BPBD Kabupaten Sidoarjo berpedoman terhadap peta resiko bencana yang sudah dibuat sesuai dengan daerah rawan bencana. Sehingga program mitigasi tentang kebencanaan dan peningkatan kesiapsiagaan akan lebih tetap sasaran.

Peran BPBD secara umum dirancang untuk penanggulangan bencana secara menyeluruh yang merupakan perubahan dari pendekatan konvensional yaitu tanggap darurat menuju perspektif baru.

# GAP MASALAH

## BPBD

Terkait pengadaan unit mobil pemadam kebakaran di Kabupaten Sidoarjo mulai tahun 2022 sampai sekarang hanya sekedar wacana saja

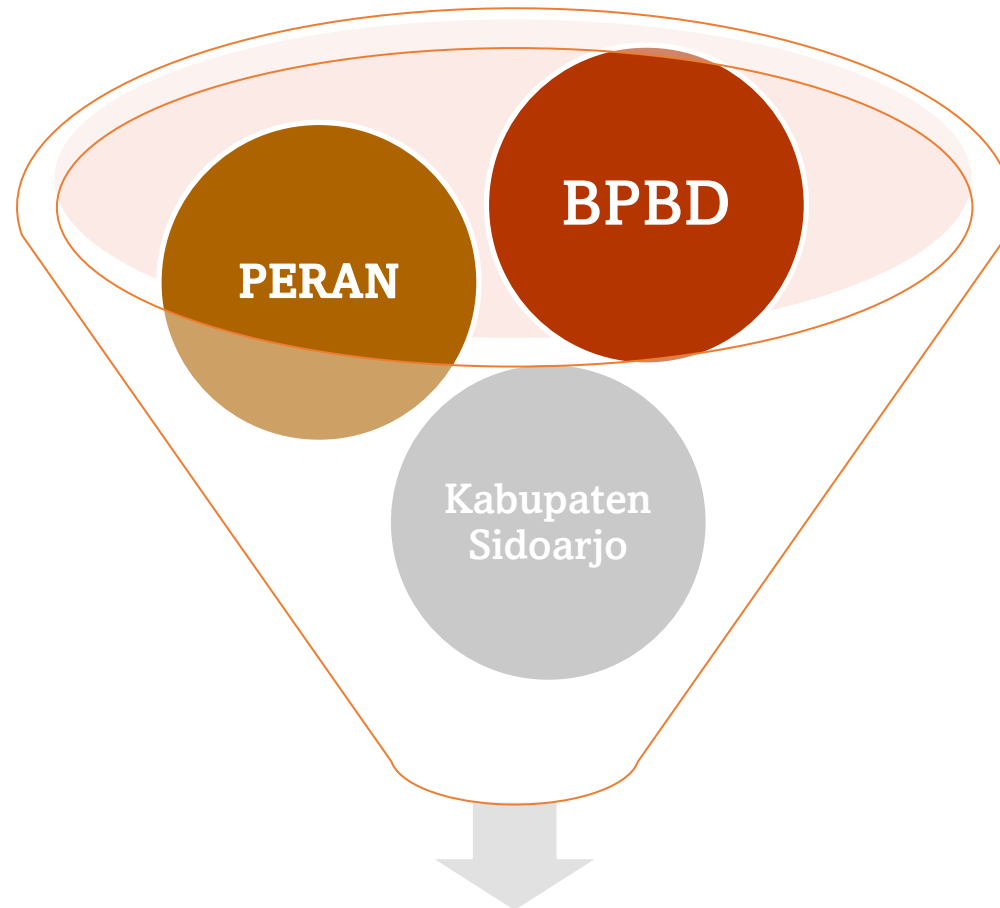
Pemkab Sidoarjo berencana menambah tiga unit mobil pemadam kebakaran (damkar) di tahun 2022. Namun rencana tersebut nampaknya bakal kandas dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022

Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sidoarjo, meski saat ini, progres pembahasan anggaran tersebut masih dalam pembahasan tim anggaran dan banggar DPRD Sidoarjo, rencana untuk penambahan unit damkar tersebut bakal ditunda.





# RUMUSAN MASALAH



**Bagaimana Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Keberfungsian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Untuk Menanggulangi Kebakaran Di Kabupaten Sidoarjo**

# DATA EMPIRIS

**Tabel 1.1**

**Rekapitulasi Unit Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidoarjo**

No	Pos Damkar	Jumlah Unit Kendaraan	WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran)
1	Buduran	3	18
2	Krian	3	18
3	Candi	2	12
4	Waru	2	12
5	Porong	2	12
6	Sidoarjo Kota	1	6

Melihat pada tabel 1.1. terkait Jumlah Unit Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidoarjo 2022 – 2024 terdapat 6 pos Damkar dengan jumlah unit kendaraan 13 dan WMK sebanyak 78 yang terbagi pada masing-masing unit kendaraan sebanyak 6 WMK, Sebetulnya itu sudah mencakup standar oprasional prosedur, namun bila melihat besaran kota atau wilayah Kabupaten Sidoarjo terdiri dari 18 kecamatan, 31 kelurahan, dan 322 desa (dari total 666 kecamatan, 777 kelurahan, dan 7.724 desa di Jawa Timur) maka selayaknya ada penambahan Pos Damkar untuk membantu menaggulangi bencana baik kebakaran atau bencana lainnya.

# PENELITIAN TERDAHULU

2023

Rifaldi (2023) Dengan judul “Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Dalam Menjalankan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (Studi Kasus Bpbd Kabupaten Bantul)” hasil peneltian menunjukan BPBD dalam lingkup sekolah berperan untuk mengedukasi anak-anak untuk lebih memiliki sikap kesiapsiagaan bencana, membantu memfasilitasi kebutuhan sekolah, hingga mengenalkan pendidikan bencana sejak dini.

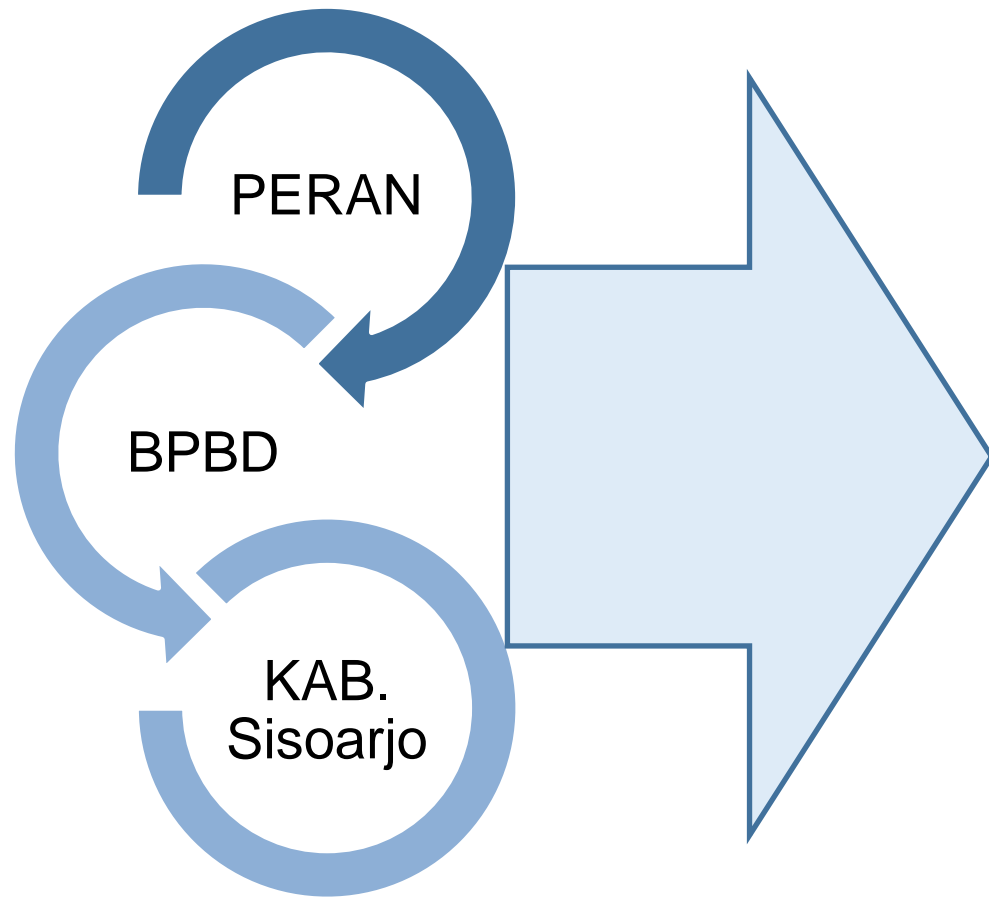
2023

Nurul Sahira (2023) judul “Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Menanggulangi Bencana Banjir Di Kabupaten Aceh Utara” hasil penelitian menunjukan peran BPBD dalam menanggulangi bencana banjir di Kabupaten Aceh Utara melalui 3 indikator pengukuran yaitu pertama tahap pra bencana dengan memberikan pelatihan tentang kebencanaan kepada masyarakat, kedua tahap tanggap darurat dalam menangani banjir sehubungan dengan melakukan langkah-langkah mulai dari antisipasi bencana hingga evakuasi bencana, dan yang terakhir tahapan pasca bencana dengan membangun fasilitas penanggulangan banjir tetapi masih dalam proses pembangunan disebabkan cakupan wilayah rawan banjir yang luas dan anggaran yang terbatas.

2024

Eriska Nahda Tsabita (2024) dengan judul Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Tahap Pra Bencana Erupsi Gunung Merapi (Studi di Kawasan Rawan Bencana III Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten) diperoleh bahwa : perlu adanya upaya penanggulangan pra bencana untuk meminimalisir dampak kejadian erupsi Gunung Merapi yang didasarkan pada UU No. 24 Tahun 2007 Pasal 33 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada Tahap Pra Bencana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan mengkaji peranan BPBD berdasarkan 5 dimensi yaitu peran pemerintah selaku stabilisator, inovator, modernisator, pelopor, dan peran pemerintah selaku pelaksana sendiri.

# TEORI PERAN YANG DIGUNAKAN



Peran Pemerintah untuk meningkatkan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan teori Sondang P, Siagian menyatakan bahwa peran adalah tempat khusus yang diberikan kepada seseorang dalam proses mencapai tujuan. Dalam hal ini BPBD, seperti kepala BPBD pemerintahan atau kabinet. Peran pemerintah yaitu pemerintah memegang peranan dominan dalam proses pembangunan. Termasuk Peran BPBD ditekankan sebagai penstabil (stabilisator), inovator, modernisasi pelopor dan pelaksana dalam pengembangan itu sendiri. Dari uraian di atas terlihat bahwa peran pemerintah merupakan pemberi pengaruh yang sangat penting dalam keberfungsian BPBD untuk menanggulangi bencana kebakaran.



# METODE PENELITIAN

Penelitian ini masuk kedalam kualitatif deskriptif, Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. penelitian ini berupaya untuk memperoleh data dengan mendalam mengenai peran BPBD. Lokasi penelitian di kantor BPBD Kabupaten Sidoarjo, Subjek penelitian adalah individu atau hal atau benda yang dijadikan sebagai tempat perolehan data untuk keperluan variabel penelitian dan permasalahan. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara wawancara mendalam (indepth interview), observasi, dan studi dokumentasi. Keabsahan data dilakukan dengan metode triangulasi data.

informan dalam penelitian ini antara lain: 1) Kepala Bidang Pengelolah dan pengendalian oprasional, 2) Kepala Bidang DAMKARMAT (Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan), 3) Kepala pelaksana BPBD.

Teknik pengumpulan data di lakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Reduksi Data, reduksi data merupakan proses selektif yang berfokus pada penyerdehanaan abstraksi dan tranformasi data mentah pada penelitian sehingga mendapatkan ringkasan data penting.

# HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memiliki peran penting dalam menghadapi situasi darurat bencana di berbagai wilayah Indonesia. Lembaga ini dibentuk untuk melakukan upaya mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Dalam keadaan darurat, BPBD memainkan peran kunci sebagai komando utama yang memastikan segala tindakan berjalan efektif dan terkoordinasi dengan baik.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran serta Tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Sesuai dengan tujuan penelitian untuk menganalisis peran badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) dalam penanggulangan kebakaran di Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan teori peran Sondang P. Siagian (2012), yaitu peran pemerintah sebagai stabilisator, inovator, modernisator, pelopor dan katalisator.

# Peran BPBD Sebagai Stabilisator

## Peran BPBD Sebagai Stabilisator

Peran BPBD Kabupaten Sidoarjo dalam tahap pra bencana sebagai stabilisator untuk mewujudkan keseimbangan masyarakat dalam berkehidupan sehari-hari. Dalam tahap kesiagaan, BPBD mewujudkan ketahanan masyarakat melalui proses sosialisasi, dilanjutkan dengan sosialisasi mengenai pembagian ancaman di wilayah Kawasan Rawan Bencana (KRB) sebagai bentuk peringatan dini disempurnakan dengan tahapan mitigasi yaitu pembentukan Forum pengurangan resiko bencana, tim relawan tangguh, sekolah siaga bencana, dan desa tangguh bencana.



**Sumber:** Dokumen BPBD Kabupaten Sidoarjo (2024)

Dapat kita lihat bahwa betapa pentingnya Peran BPBD sebagai stabilisator dalam memberikan ketenangan melalui sosialisasi kepada seluruh masyarakat secara efektif dan pendekatan persuasif. Selanjutnya terkait bagaimana pelaksanaan sosialisasi yang diberikan BPBD Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan kegiatan pasca bencana dengan baik dengan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dilaksanakan. Dengan adanya sosialisasi tersebut diharapkan masyarakat dapat tetap tenang dan kondusif.

# Peran BPBD Sebagai Inovator

Peran BPBD Kabupaten Sidoarjo sebagai inovator adalah sebagai pencetus temuan, sistem, metode, ataupun cara berpikir baru. Dalam hal ini, BPBD Kabupaten Sidoarjo menjadi sumber dari hal-hal baru yang dicetuskan. Inovasi yang dihadirkan oleh BPBD Kabupaten Sidoarjo bertujuan untuk membangun dan memperbaiki hal yang sudah ada. Maka dari itu, inovasi harus selalu diperbaharui sesuai dengan perkembangan kondisi dan teknologi terutama dalam tahap pra bencana. Inovasi yang dilakukan lebih dulu adalah inovasi di lingkungan pemerintahan dengan tujuan cara dan sistem kerja yang lebih terstruktur agar lebih mudah diterima oleh masyarakat



Selanjutnya ***Zona siaga*** adalah salah satu inovasi yang dirancang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas program penanggulangan bencana khususnya pada peningkatan kesiapsiagaan bencana asap akibat kebakaran hutan lahan. Setiap kecamatan memiliki 2-3 orang Satgas dan Relawan Penanggulangan Bencana. Pada saat terdapat potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan, satgas kecamatan yang bertugas langsung mengecek ke lapangan dengan membawa peralatan pemadaman dini yang sudah dimodifikasi, terdiri dari motor trail, selang pemadam. Apabila pemadaman dini berhasil, maka penanganan bencana cukup dilakukan oleh satgas kecamatan dan relawan tersebut, namun apabila situasi kebakaran tidak terkendali, maka satgas kecamatan segera melapor ke Pusat Pengendalian Operasi di Posko Induk Kabupaten untuk dapat ditindaklanjuti oleh Tim Reaksi Cepat Kabupaten Sidoarjo

# Peran BPBD Sebagai Modernisator

Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidoarjo selaku Modernisator yaitu harus mempunyai kemampuan manajerial, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, mempunyai kemampuan untuk mengelola Sumber Daya Alam, memiliki sistem pendidikan nasional yang baik agar tercipta sumber daya manusia yang produktif, memiliki landasan kehidupan politik yang kuat dan demokratis, memiliki visi yang jelas terhadap masa depan, dan bersedia mengambil resiko dan orientasi masa depan serta bersedia menerima perubahan, menurut Sondang P. Siagian dalam (Alvin & Rinanda, 2022) Berdasarkan hasil penelitian, Penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh BPBD Kabupaten Sidoarjo selaku modernisator melakukan pendekatan dengan cara memanfaatkan teknologi dan ilmu pengetahuan kebencanaan seperti pemanfaatan media sosial berupa Instagram dan Website sebagai upaya penyampaian informasi terkait kebencanaan terhadap masyarakat.

Melihat dari pernyataan disamping bila dikaitkan dengan teori peran dari teori Sondang P. Siagian (2012) penulis menyimpulkan bahwa peran Modernisator BPBD Kabupaten Sidoarjo sudah sesuai, dilihat dari indikator pengetahuan dan juga kemampuan berdasarkan hasil wawancara serta observasi beragam tugas dan juga seluruh kegiatan yang menjadi tugas utama sudah dilaksanakan dengan baik, terlebih dengan penambahan personil yang mendukung peran BPBD sebagai modernisator jauh lebih baik.



# Peran BPBD Sebagai Pelopor

Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidoarjo Selaku Pelopor harus menjadi panutan bagi semua masyarakatnya seperti bekerja dengan produktif, menegakkan keadilan dan kedisiplinan, mempunyai kepedulian terhadap lingkungan, sosial dan budaya, siap berkorban untuk kepentingan negara menurut Sondang P. Siagian dalam (Alvin & Rinanda, 2022). Termasuk dalam hal penanggulangan kebakaran baik ditingkat Kelurahan Desa harus menjadi panutan bagi semua masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, BPBD Kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan tugasnya sebagai pelopor sudah mampu bekerja dengan produktif, menegakkan keadilan dan kedisiplinan serta mempunyai kepedulian terhadap lingkungan dan sosial.



Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada Kabupaten Sidoarjo mengenai indikator kinerja sudah optimal karena BPBD selalu siaga 24 jam melakukan kinerja dan topoksi secara maksimal dan sesuai peraturan pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidoarjo mengenai indikator kedisiplinan sudah optimal karena pegawai selalu disiplin dengan mendatangi kawasan baik lahan atau pemukiman padat penduduk atau perkantoran dari pabrik sampai lembaga sekolahan guna untuk melakukan sosialisasi maupun menolong masyarakat pada saat terjadinya bencana khususnya kebakaran.

# Peran BPBD Sebagai Pelaksana

Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidoarjo Selaku Pelaksana Sendiri terjawab dengan terlaksananya tugas yang sudah menjadi kewajiban Pemerintah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidoarjo. Seperti kegiatan pembangunan karena merupakan tanggung jawab nasional dan karena berbagai pertimbangan seperti keselamatan negara, keterbatasan anggaran, kemampuan yang belum memadai yang tidak dapat diserahkan kepada pihak swasta menurut Sondang P. Siagian dalam (Alvin & Rinanda, 2022).

Dengan demikian BPBD Kabupaten Sidoarjo bertanggung jawab atas perannya dalam upaya kepedulian lingkungan sosial, khususnya dalam upaya penanggulangan kebakaran hal tersebut bukan semata-mata menjadi bebannya pemerintah namun memang sudah menjadi tanggung jawabnya pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian, BPBD Kabupaten Sidoarjo belum melibatkan pihak swasta dalam hal penanggulangan kebakaran, baik saat terjadi kebakaran maupun pasca kebakaran. Maka dapat dipahami bahwa BPBD Kabupaten Sidoarjo telah memenuhi indikator sebagai pelaksana sendiri.





# KESIMPULAN

Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Menanggulangi kebakaran Kabupaten Sidoarjo secara keseluruhan sudah baik. Namun masih ada kekurangan dari indikator beberapa peran BPBD. Hal ini dapat dilihat pada aspek sebagai berikut: **Pertama stabilisator**, hal ini terlihat selektif dan juga sosialisasi BPBD sosialisasi kepada seluruh masyarakat secara efektif dan pendekatan persuasif. **Kedua Inovator**, BPBD Kabupaten Sidoarjo mempunyai Inovasi dari Zona siaga merupakan salah satu bentuk perwujudan inovasi yang nyata dari peran BPBD Kabupaten Sidoarjo untuk meningkatkan pelayanan terbaik bagi masyarakat. **Ketiga modernisator**, pengetahuan dan juga kemampuan serta beragam tugas dan juga seluruh kegiatan sudah dilaksanakan dengan baik, **Keempat** Pelopor, para pegawai mengutamakan disiplin dalam berbagai tugas.

**Kelima pelaksana** bila dilihat dari indikator tanggung jawab, bila dilihat dari beberapa Faktor pendukung dan penghambat Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menanggulangi bencana berdasarkan hasil wawancara dan observasi faktor yang mempengaruhi terjadi adanya yang faktor alam jika terjadi kemarau panjang sehingga menyebabkan gesekan rumput kering yang memercikan api ada juga faktor yang disebabkan oleh manusia yang tidak menjaga seperti saluran listrik terlalu padat dengan memasang saluran kabel kurang benar, di sekitar seperti memasang elpiji dengan standar yang salah dan juga masak yang dibiarkan tidak dijaga hal ini menyebabkan sering terjadinya kebakaran.

# REFRENSI

- [1] Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- [2] C.D. Balenina, 'Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Desa Sampah Mandiri Di Desa Kalisoro, Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar', Bestuur, 7.1 (2019), 26–35.8. BAB III\_\_2018128IH. (n.d.).
- [3] Konsorsium Pendidikan Bencana Indonesia. 2011. "Sekolah Siaga Bencana," Pusat Pendidikan Mitigasi Bencana.
- [4] Jayantika., M. (2013). Hubungan antara titik panas dengan perubahan penutupan/penggunaan lahan (studi kasus: Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Institut Pertanian Bogor.
- [5] Agung, Kurniawan. (2005). Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaharuan.
- [6] Anggara, Sahya, (2012). Ilmu administrasi Negara. Bandung: CV Pustaka Setia
- [7] Danim, Sudarwan. (2004). Motivasi Kepemimpinan & Efektivitas Kelompok. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- [8] Arikunto, Suharsimi. 2016. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta
- [9] Creswell, John. (2013) Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed, alih bahasa oleh: Ahmad Fawaid, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [10] Florante, Fengky dan Nina Yulianti (2020). Mari Belajar Tentang Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB), Bogor: PT Penerbit IPB Press.
- [11] Marwansyah (2021). Manajemen Sumber Daya Manusia, Bandung: Alfabeta, CV, Edisi Dua. Cetakan keempat.
- [12] Suhardono, Edy (2021). Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya), Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- [13] P. Siagian, Sondang. (2012). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- [14] Rianto Rahadi, Dedi. (2010). Manajemen Kinerja Sumber Daya Manusia. Malang: Tunggal Mandiri Publishing
- [15] Persons, Wayne. (2019). Public Policy: Pengantar Teori & Praktik Analisis Kebijakan. Jakarta: Kencana.
- [16] Nurkumalasari, 2014, Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Maros, tidak dipublikasikan, Universitas Hasanudin Makasar.
- [17] Furqon hasani. (2021). Peran BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Bantul Dalam Mitigasi Bencana Alam. Tesis. Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta

